ISSN : 2581-1541 E-ISSN : 2086-1109

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pada Program Gerbang Mapan Di Desa Ketapang Oleh Pemerintahan Kabupaten Tangerang

Irma Novia Royadi, Yeby Ma'asan Mayrudin

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten, 42163, Indonesia

E-mail:
yeby@untirta.ac.id

Abstract

Caught in various studies the condition of Ketapang village which was originally slum and economically backward. This made the government make development efforts as well as empowerment of natural resources and human resources in Ketapang Village. Ketapang Village is the focus of empowerment through a program, namely "Gerbang Mapan" (Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai with various coaching and training activities for the community. Community empowerment is considered effective in advancing the community in Ketapang Village. We use the theory of community empowerment formulated by Sunyoto Usman as an analytical tool. The research method used is qualitative with a case study approach by deepening community empowerment in the form of activities in the form of empowering MSMEs through training and coaching and developing mangrove ecotourism. The results of the study showed that the community empowerment program in Ketapang Village was partially successful in empowering the community to become an independent and empowered community. However, there are challenges in implementing this Gerbang Mapan program, namely the lack of Mangrove tourism visitors has an impact on the low sales results of MSMEs of community business actors.

***Keywords**: Gerbang Mapan, Community Empowerment, MSMEs, Coastal Communities, Tangerang*

Abstrak

Tertangkap diberbagai penelitian kondisi desa ketapang yang semula kumuh dan tertinggal secara ekonomi. Hal tersebut membuat pemerintah melakukan upaya pembangunan sekaligus pemberdayaan SDA dan SDM di Desa Ketapang. Desa Ketapang menjadi fokus pemberdayaan melalui suatu program yaitu Gerbang Mapan (Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai) dengan berbagai kegiatan pembinaan serta pelatihan kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dianggap efektif untuk memajukan masyarakat di Desa Ketapang. Kami menggunakan teori pemberdayaan masyarakat yang diformulasikan oleh Sunyoto Usman sebagai pisau analisa. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan memperdalam pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan-kegiatan berupa pemberdayaan UMKM melalui pelatihan-peltihan dan pembinaan dan pengembangan ekowisata mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat di Desa Ketapang ini sukses sebagian dalam persoalan memberdayakan masyarakat menjadi masyarakat mandiri dan berdaya. Akan tetapi, terdapat tantangan dalam menjalani program gerbang mapan ini, yakni minimnya pengunjung wisata Mangrove berdampak pada rendahnya hasil penjualan UMKM pelaku usaha masyarakat.

Kata Kunci: Gerbang Mapan, Pemberdayaan Masyarakat, UMKM, Masyarakat Pesisir, Tangerang

1. Pendahuluan

Lingkungan pesisir laut menjadi penting untuk dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar terciptanya kehidupan yang tentram (Wibowo et al., 2022). Masyarakat harus selalu menjaga lingkungan pesisir, karena sumber daya yang ada di sekitar pesisir laut dapat dimanfaatkan dengan baik, jika lingkungan pesisir terjaga dengan baik (Saputra, 2016). Masyarakat pesisir pantai tidak selalu identik dengan nelayan saja, kendati di dalamnya terdapat kegiatan pemberdayaan pesisir, pengelolaan pesisir maupun pengembangan pariwisata wilayah pesisir (Sartika, 2019). Wilayah pesisir dinilai memiliki ekonomi tinggi (Josiana & Hizbaron, 2019), meskipun terancam keberlanjutannya. Dari potensi wilayah untuk peningkatan ekonomi tersebut, seharusnya masyarakat pesisir memiliki potensi besar untuk pengembangan UMKM berbasis pemberdayaan masyarakat.

Daerah pesisir masih menjadi daerah dengan kategori tertinggal, sehingga banyak permasalahan yang harus dientaskan, Masyarakat pesisir juga masih lekat dengan pemikiran yang tertinggal dan tidak mengelola potensi secara optimal (Afrizal dan Dadang Mashur, 2018). Hal ini berdampak pada turunnya kualitas dan kurang berkembangnya kegiatan di sektor ekonomi dengan basis pemanfaatan sumber daya laut wilayah pesisir. Dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 mengenai Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir tersebut yang mendeskripsikan bahwa sumber daya pesisir memiliki peran untuk mendorong Pembangunan Ekonomi Daerah dan Nasional guna meningkatkan mengenai pemasukan devisa, pendapatan penduduk (Yuliadi et al., 2017). Bahwasannya pemerintah telah melaksanakan program-program yang digunakan sebagai pendukung pelestarian laut melalui pengelolaan pesisir pantai (Maezahroh, 2018).

Desa Ketapang menjadi salah satu desa yang diberikan sebuah pemberdayaan melalui suatu program yaitu Gerbang Mapan (Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai) oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Adanya pemberdayaan masyarakat tentu saja sebagai upaya menanggulangi kesenjangan dan kemiskinan pada masyarakat (Usman, 2012). Terdapat beberapa pemberdayaan pada program tersebut, seperti pemberdayaan nelayan, pengembangan ekowisata dan ekonomi kreatif berupa pelatihan UMKM. Pemberdayaan masyarakat di desa pesisir dianggap efektif dalam pemajuan dan keberdayaan masyarakat.

Pembedayaan adalah suatu upaya membangun masyarakat membentuk kesadaran sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat itu sendiri (Usman, 2012). Pemberdayaan dilakukan sebagai usaha

untuk dapat menanggulangi dan meminimalisir adanya kemiskinan. Selain itu, berbagai upaya melalui kegiatan yang bertujuan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat dapat percaya diri, mencapai kemandirian sehingga tidak lagi bergantung pada struktural (Usman, 2012).

Berbagai upaya dalam membangun masyarakat bukan sekedar untuk menjalankan atau merealisasikan suatu proyek secara fisik melalui berbagai anggaran dana ataupun subsidi (Usman, 2012). Akan tetapi, berbagai upaya membangun melalui gerakan untuk mengubah lingkungan sehingga terciptanya tujuan secara kondusif yang tentu saja hasil tersebut akan berdampak bagi pelaku dari pembangunan tersebut (Usman, 2012). Dalam penelitian (Maezahroh, 2018) menerangkan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan dimana pemerintah bergerak mendorong nelayan dan pedagang dengan memberikan mereka pengetahuan budidaya, bantuan alat tangkap, perahu maupun mesin. Disamping itu, para ibu-ibu juga di dorong untuk memproduksi kuliner dari olahan ikan melalui UMKM.

Dalam pemberdayaan yang dijelaskan oleh (Najiyati, 2005) mengenal salah satu prinsip keswadayaan atau kemandirian. Prinsip tersebut yang memiliki arti mengedepankan dan menghargai potensi dari masyarakat setempat daripada melibatkan bantuan dari pihak lain. Pada konsep ini tidak melihat masyarakat miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan *(the have not),* melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit *(the have little).* Adanya subsidi dari pihak lain sebagai bentuk bantuan yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, dengan begitu adanya.

Penelitian mengenai pengelolaan wilayah pesisir telah banyak dilakukan seperti dalam penelitian (Shafira dan Anwar, 2021) mengungkapkan jika pengelolaan wilayah pesisir masih belum memberikan cukup ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Adapun model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yakni menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokalnya. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Safrina, 2020) menghasilkan penelitian jika pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat dapat meminimalkan dampak negatif dari pembangunan dan memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang berimbang dan obyektif sehingga dapat memberikan kontribusi untuk pemecahan masalah-masalah lingkungan.

Penelitian yang dilakukan (Fadli dan Nurlukman, 2018) mengenai pengembangan wilayah pesisir diperlukan kolaborasi pemerintah. Hal demikian disebabkan dalam pengembangan wilayah pesisir masih sangat

minim bahkan di tingkat internal pemerintah daerah. Para pihak hanya fokus pada tugas dan peran masing-masing dan sangat minim satu sama lain. Penelitian serupa juga dilakukan di Desa Karangsono, Kabupaten Indramayu yang dilakukan (Adibowo, 2014) mengungkapkan para pelaksana program PEMP yang ada belum maksimal sebagai sumberdaya manusia apabila dibandingkan dengan jumlah masyarakat pesisir yang ada, sehingga memerlukan kerjasama dengan pihak yang lainnya agar PEMP dapat terlaksana dengan maksimal. Penafsiran kebijakan diperoleh melalui kejelasan prosedur kerja, kejelasan program kerja PEMP di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.

Penelitian mengenai tata kelola pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan melalui dana hibah dan bantuan sosial telah dilakukan oleh (Gemiharto & Rosfiantika, 2017) mengungkapkan jika inisiatif pemerintah Kota Bandung dalam program dana hibah dan bantuan sosial secara *online* memiliki peran signifikan dalam upaya mengatasi berbagai kelemahan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses penyaluran dana hibah dan bantuan sosial selama ini. Diperlukan koordinasi yang baik antar SKPD Terkait dalam memberikan informasi layanan publik kepada masyarakat. Diperlukan komitmen, semangat kerja keras, dan dukungan /political *will* yang kuat dari para stakeholder pemerintah daerah dan peran serta masyarakat dalam melakukan monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan keberhasilan pembangun.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan peneliti mencoba mencari *gap research* dari objek penelitian dengan fokus penelitian ini menyoroti tentang upaya Pemkab Tangerang dalam Pemberdayaan dan Wilayah Pesisir melalui Program Gerbang Mapan di Desa Ketapang Kabupaten Tangerang. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian untuk menggali suatu kasus. Kasus kesenjangan dan kemiskinan yang terjadi di wilayah pesisir memerlukan peran pemerintah, sehingga tujuan penelitian dilakukan untuk menggali lebih dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Gerbang mapan di Desa Ketapang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai di Desa Ketapang oleh Pemerintahan Kabupaten Tangerang?”

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1. Pemberdayaan

Pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya membangun masyarakat membentuk kesadaran sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat itu sendiri (Usman, 2012). Usman juga menekankan upaya pemberdayaan kepada masyarakat ini sebagai usaha untuk dapat menanggulangi dan meminimalisir adanya kemiskinan juga kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks.

Dikutip dari bukunya (Usman, 2012) mengungkapkan adanya globalisasi yang mendunia pada saat ini sangat mempengaruhi pembangunan dalam suatu negara. Upaya membangun melalui berbagai aktivitas pembangunan masyarakat seharusnya bukan saja hanya berfokus pada persoalan ekonomi dan teknologi semata, tetapi lebih dari itu yakni proses membangun martabat manusia yakni masyarakat sekitar itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk dapat menjadikan masyarakat lebih mampu dan mandiri dalam konteks menanggulangi keterbelakangan dalam kesenjangan dan kemiskinan di masyarakat. Pendidikan yang rendah seperti banyaknya masyarakat yang masih buta huruf memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan adanya kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat itu sendiri. Bahkan, lingkungan masyarakat yang kurang terawat dan terkelola dengan baik cenderung rentan terhadap penyakit. Bahkan, hal tersebut jauh terlihat adanya kesenjangan ketika kehadiran ideologi ataupun teknologi baru yang tidak biasanya dan berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Sehingga kebaharuan yang ada cenderung mendapatkan sentimen curiga dan negatif dari masyarakat (Usman, 2012).

Teori (Usman, 2012) menegaskan terdapat strategi sebagai upaya untuk memperoleh tujuan dari pemberdayaan masyarakat yang bisa diupayakan dan dapat diimplementasikan antara lain: Menciptakan Iklim, Memperkuat Daya, dan Melindungi. Pertama, membentuk kondisi iklim yang dapat menstimulus masyarakat untuk dapat berkembang *(enabling).* Kedua, meningkatkan kekuatan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri (*empowering).* Ketiga, pemberdayaan yang terjadi tidak lepas dengan upaya melindungi *(protect).* Maka dari itu, berbagai usaha yang bersifat membangun masyarakat sudah semestinya dapat menjadikan masyarakat lebih baik. Program pembangunan desa telah banyak dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dengan berbagai

program pembangunan pedesaan yang beranekaragam, di antaranya:

1. Pembangunan pada bidang pertanian;
2. Industrialisasi pedesaan;
3. Program pembangunan masyarakat desa terpadu; dan
4. Strategi pusat pertumbuhan (Usman, 2012).

Ada beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk mencapai keberhasilan program pemberdayaan, di antaranya: prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan (Najiyati, 2005). Adapun prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Prinsip Kesetaraan, menjadi salah satu prinsip paling utama dalam upaya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Kesetaraan dalam konteks ini berarti adanya kedudukan yang sejajar di antara masyarakat dengan lembaga sebagai pelaku baik perempuan ataupun laki-laki dari adanya program pemberdayaan masyarakat.
b) Partisipasi, menjadi penting ada sebagai prinsip pemberdayaan. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya prinsip partisipatif maka akan menstimulasi masyarakat untuk dapat terlibat dalam proses pada program pemberdayaan.
c) Keswadayaan atau kemandirian, memiliki arti mengedepankan dan menghargai potensi dari masyarakat setempat daripada melibatkan bantuan dari pihak lain. Pada konsep ini tidak melihat masyarakat miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan *(the have not),* melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit *(the have little).*
d) Berkelanjutan, prinsip yang tak kalah penting juga dari adanya program pemberdayaan yakni prinsip berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan sudah semestinya menjadi tujuan juga untuk kedepannya bagi masyarakat meskipun di awal lebih dominan peran pendamping daripada masyarakat sendiri.

Pembangunan wilayah pesisir tentu saja memiliki tujuan dan sasaran pembangunan. Berikut merupakan tujuan jangka panjang secara umum dari adanya pembangunan wilayah pesisir (Mulyadi, 2005), di antaranya:

1. Meningkatnya kesempatan dan perluasan usaha dan kerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
2. Berkembangnya program terkait dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal di wilayah pesisir.

3. Peningkatan potensi dan partisipasi dari masyarakat pantai dalam upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
4. Memperdalam pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan, pelatihan dan riset serta pengembangan di wilayah pesisir pantai.

Teori pemberdayaan Usman sangat tepat untuk menganalisa upaya pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memberdayakan SDA dan SDM Desa Ketapang melalui program Gerbang Mapan. Merujuk pada Teori ini, peneliti dapat menganalisa mulai dari Pemkab Tangerang dalam membuat iklim yang dapat menstimulus masyarakat untuk dapat berkembang *(enabling).* Kemudian upaya peningkatan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Ketapang (*empowering).* Hingga dilihat upaya perlindungan *(protect)* Pemkab Tangerang terhadap kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di Desa Ketapang. Kiranya permasalahan yang nanti ditemukan dapat dibedah dengan standar dalam teori pemberdayaan Usman.

2.2. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir memuat teori, dalil, atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Uraian dalam kerangka berpikir menjelaskan antar variabel. Kerangka berpikir merupakan proses yang sangat penting dalam menyusun suatu penelitian, karena dalam proses ini pembaca dapat mengetahui apa yang akan dilakukan oleh peneliti dan bagaimana urutan penelitian dilakukan.

Kerangka berpikir merupakan proses yang sangat penting dalam menyusun suatu penelitian, karena dalam proses ini pembaca dapat mengetahui apa yang akan dilakukan oleh peneliti dan bagaimana urutan penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Pengelolaan Wilayah Pesisir Melalui Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai di Desa Ketapang Kabupaten Tangerang.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

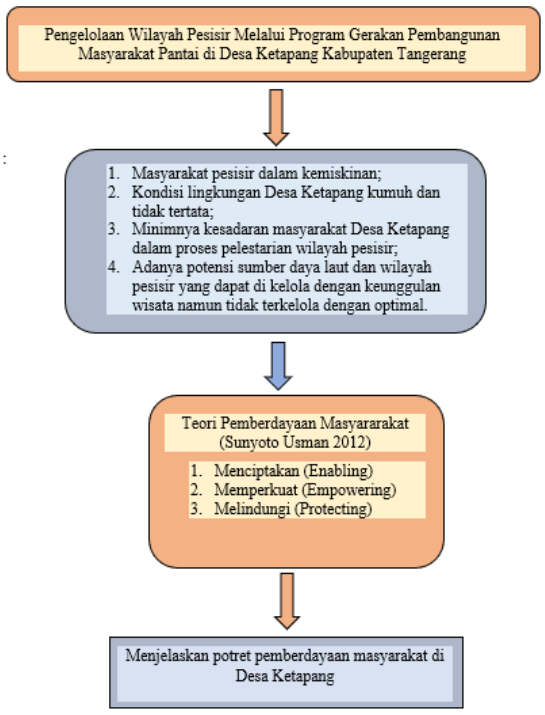

Sumber: (Diolah Peneliti, 2024)

3. Objek dan Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik yang digunakan dengan menjabarkan kasus secara mendalam tentang suatu kasus. Pesisir menjadi salah satu potret wilayah kesenjangan dan kemiskinan yang terjadi, pemerintah harus memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Dengan menggunakan studi kasus intrinsik peneliti menggali lebih dalam kasus pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program Gerbang Mapan di Desa Ketapang, mencari benang merah penanggulangan kesenjangan dan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini didapatkan dari berbagai sumber informasi melalui Obeservasi (peneliti melakukan observasi langsung. penulis mengamati bagaimana Gerbang Mapan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat pesisir pantai hingga apa saja permasalahan yang terjadi dalam realisasi program tersebut. Wawancara (peneliti telah melakukan dialog kepada para pihak seperti Dinas Perikanan, Kepala Desa Ketapang, masyarakat Desa Ketapang dan Pelaku UMKM) Dokumentasi atau literatur dengan topik bahasan. Metode ini sejalan untuk penelitian ini karena dapat menjabarkan kasus secara mendalam yang terjadi dalam pelaksanaan program Gerbang Mapan di Desa Ketapang dengan fokus pemberdayaan masyarakat.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Program Gerbang Mapan Melalui Pelatihan dan Bantuan UMKM

Desa Ketapang terletak di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sebagai salah satu wilayah pesisir yang menjadi sasaran pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pada saat ini Desa Ketapang berada dalam kepemimpinan Ahmad Khatibul Umam yang memiliki visi *"Bersih, Religius, Sejahtera, Rapi, dan Indah"* yang disingkat menjadi *"Ketapang Berseri".* Keinginan diwujudkan dengan melakukan pembangunan dengan basis keagamaan, budaya hukum, dan berwawasan lingkungan dengan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat (Ketapang, 2024).

Pemerintah Desa Ketapang memiliki misi mewujudkan visi tersebut yaitu program jangka panjang, di antaranya: meneruskan pembangunan yang belum terealisasi, peningkatan kerja sama dengan berbagai lembaga di desa, mensejahterakan masyarakat desa dengan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Kemudian misi jangka pendeknya, meliputi: pelestarian adat istiadat desa, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki prasarana dan

sarana ekonomi dan pendidikan upaya meningkatkan sumber daya manusia Desa Ketapang (Ketapang, 2024).

Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan) tertuang dalam peraturan bupati nomor 33 tahun 2022, terdapat program bernama pembangunan. Program tersebut bertujuan peningkatan terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan. Melihat kondisi yang tidak memadai dari segi prasarana, sarana yang di mana dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Hal tersebut yang mendasari pemerintah meluncurkan program ini. Selain mengembangkan ekonomi, juga mengembangkan infrastruktur masyarakat secara merata (Perbub, 2022).

Program Gerbang Mapan ini dirumuskan untuk merealisasikan misi pemerintah Kabupaten Tangerang dalam kegiatan peningkatan dan pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan dan pemerataan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dengan membuka usaha melalui sumberdaya yang di miliki desa pesisir (Fadli & Nurlukman, 2018).

Program Gerbang Mapan ini mendukung keunggulan masing-masing daerah tanpa meninggalkan budaya, adat lokal termasuk kuliner (Firmansyah, 2022). Masyarakat juga dibentuk beberapa kelompok seperti kelompok budidaya mangrove, kelompok budidaya tambak, kelompok budidaya nelayan, dan kelompok pengolahan ikan. Mereka mendapat pelatihan dari pemerintah (Firmansyah, 2022).

Pengembangan sumberdaya alam dengan melakukan pembangunan wisata menjadi industri yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi selain datang sumber wisata itu sendiri, juga dari terbukanya lapangan kerja, dan membantu peningkatan pendapatan UMKM karena adanya korelasi antara pengunjung wisatawan dengan pendapatan UMKM.

Hasil temuan lapangan terlihat bagaimana Program Gerbang Mapan ini tidak lepas dari pembangunan dan pemberdayaan SDA/SDM. Ada banyak cara untuk proses pembangunan dan pemberdayaan tersebut Pemberdayaan nelayan, Pelatihan dan Bantuan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Di Desa Ketapang sendiri, salah satu usaha untuk meningkatkan penghasilan UMKM melalui wisata mangrove. Untuk itu, perlu adanya kolaborasi untuk meningkatkan lingkungan bisnis UMKM. Merubah cara berpikir masyarakat dengan menyadari tersedianya potensi lokal atau keungulan (mangrove dan ikan) yang berlimpah tidak akan dirasakan atau memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan di Pesisir tersebut dalam kemandirian ekonomi keluarga tanpa inovasi.

4.2. Pola Pengembangan UMKM Masyarakat Desa Ketapang

Pemerintah Kabupaten Tangerang hadir membawa program Gerbang Mapan ke Desa Ketapang selain melakukan pembangunan infrastruktur, juga melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mencapai tujuan peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Dinas Perikanan memberikan bantuan pelatihan dan barang kepada kelompok-kelompok masyarakat di Desa Ketapang sebagai upaya untuk memberdayakan mereka. Terdapat dua kelompok masyarakat yang difokuskan untuk mendapat dukungan oleh Dinas Perikanan yaitu nelayan dan pelaku usaha. Kedua kelompok ini diberikan pelatihan secara teori maupun praktik, serta bantuan barang untuk menunjang usaha mereka.

Sebagai upaya untuk memberdayakan pelaku usaha UMKM Desa Ketapang, maka dari itu Dinas Perikanan melakukan pelatihan peningkatan UMKM kepada pelaku usaha dan masyarakat umum. Dinas Perikanan berharap dapat mendukung ekonomi masyarakat. Terdapat beberapa pelatihan yang dilakukan seperti: pelatihan pembuatan kerupuk ikan, sirup mangrove, es krim mangrove, puding mangrove, olahan mangrove, ikan, udang, serta berbagai olahan lahan khas pesisir lainnya. Berbagai program pelatihan semacam pembentukan dan pelatihan UMKM dengan fokus ke kuliner pesisir. Kemudian hasil pengolahan buah mangrove seperti dodol, sirup, klepon, abon bandeng. Masyarakat lainnya diberdayakan untuk bisa berbisnis kuliner dengan bahan dasar olahan dari laut.

Selain itu, pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kemampuan dalam menghadapi masa sulit secara ekonomi. Sehingga mereka dilatih dan didukung untuk bisa berdaya dan mampu mengingatkan kualitas kehidupan finansial mereka. Terdapat berbagai pelatihan yang diberikan Dinas Perikanan melalui pelatihan untuk meningkatkan skill masyarakat agar mampu berdaya dalam pengelolaan potensi alam pesisir, seperti pembuatan produk makanan yang berbahan dasar ikan dan mangrove. Namun nyatanya tidak semua masyarakat aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dan sarana yang didukung oleh pemerintah.

Pemerintah dalam memberikan bantuan UMKM kepada masyarakat dilakukan dengan pengajuan proposal oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan modal dan arah pengembangan usaha yang akan dilakukan. Akan tetapi, proses pengajuan yang diberikan dibutuhkan tingkat seleksi dan tempo yang sangat panjang bahkan kerap kali hasil pengajuan tidak sesuai dengan yang telah diajukan di proposal pengajuan usaha UMKM. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh

Bapa Asnawi selaku Aparatur Pemerintah Desa Bidang Perencanaan dan Pembangunan:

> *"Untuk dana usaha dari pemerintah yang penting ajuin proposal dulu. Kalo nelayan ada yang minta bahan bikin perahu, mesin, bahan bakar, modal usaha, jaring-jaring. Kalau UMKM biasanya mengajukan buat modal atau mengembangkan usaha. Banyak UMKM yang dibantu buat beli bahan, buat grobak, dan lain lain modal usaha. Nanti uangnya dibagi ke anggota kelompok itu atau siapa yang paling butuh. Tapi pengajuan itu tidak langsung di acc, butuh waktu berbulan bulan bisa hingga setahun. Paling cepet 5-6 bulan, ada seleksi 3 bulan paling cepat. Pengajuan juga ga selalu sesuai pengajuan."* Asnawi (Aparatur Pemerintah Desa Bidang Perencanaan dan Pembangunan).

Begitupun yang disampaikan oleh Dinas Perikanan menyampaikan bahwa semenjak hadirnya bantuan ini banyak pedagang dadakan atau orang-orang yang hanya menginginkan bantuan tetapi tidak menjalankan usaha. Sehingga untuk bantuan apapun prosedurnya mengajukan proposal. Ini menjadi tahapan penting untuk melakukan seleksi penerima bantuan sehingga membutuhkan waktu. Adapun jenis bantuannya beragam yang mana diperuntukkan untuk menunjang usaha nelayan dan pelaku usaha yang diberdayakan. Akan tetapi bantuan yang diberikan tidak selalu sesuai dengan yang diajukan karena Dinas memiliki pertimbangan sendiri.

> "*Ada kegiatannya pelatihan, dibekali pelatihan secara teori maupun praktik, bagaimana mengolah bahan sampe jadi produk kaya misalnya kerupuk, dimsum, somay, baso. Sebenernya olahan kita ada bahan bakunya namanya surini (ikan laut berdaging putih yang digunakan sebagai bahan awal pembuatan aneka produk olahan ikan/fish jelly produk). Jadi mereka bisa bentuk apa aja. Pelatihan, kita juga kasih talenan, kompor, freezer, alat pengolahan, ada boot buat buat jualan, ada bantuan alat tangkap. Dinas kasih ruko ke pedagang, bantuan solar ke nelayan. Ada juga pelatihan bagaimana mengolah sampah itu kita latih juga."* Hari (Kasi Dinas Perikanan)

Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang turut mendorong pelatihan UMKM. Hal tersebut dirasakan oleh salah satu pelaku usaha asal Desa Ketapang bernama Ibu Atun. Salah satu contoh keberhasilan UMKM yang dilakuan di Desa Ketapang seperti yang telah dilakukan oleh Ibu Atun dengan usahanya membuat kerupuk dari Ikan. Berbagai cara yang diberikan oleh Dinas Perikanan

Kabupaten Tangerang seperti dilaksanakannya Bimbingan Teknis mengenai pemajuan UMKM melalui penyuluhan bagaimana cara mengolah dan mengemas makanan dengan label sehingga menjadi menarik. kompor, freezer, blender, alat alat pengolahan dengan mengajukan proposal terlebih dahulu.

> "*Dinas perikanan sering mengadakan bimtek, kadang kadang di luar. Kemarin di Bandung. Perwakilan aja, ketuanya aja. Kadang-kadang tempatnya di mangrove. Itu diajarin bikin kuliner, ada penyuluhan tentang mengemas, mengolah makanan. Saya pake label disuruh dinas. Dinas perikanan yang nyuruh pake label. Dinas juga kasih barang, misalnya. Saya usaha begini bikin sendiri terus dibantu alat usaha dari dinas perikanan. Alhamdulillah banyak dapet bantuan. Dapet bantuan oven buat pengering. Jadi saya ga ada kendala, ga bergantung sama cuaca karena ga dijemur. Dinas perikanan mendukung usaha saya. Saya kalo mau dapet bantuan harus kirim proposal. Ga dikasih langsung."*– Atun (Pedagang).

Berdasarkan informasi informan Perikanan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha. Masyarakat dilatih untuk mengolah makanan berbahan ikan menjadi kerupuk, dimsum, dan jenis makanan lainnya. Menurut ibu Atun, bahwa dirinya diberitahu untuk menggunakan label pada produk jualannya agar lebih menarik.

Beberapa hal sebagai strategi dalam pemberdayaan meliputi: harus menciptakan iklim (*enabling*), memperkuat daya atau meningkatkan potensi masyarakat (*empowering*), dan perlindungan sumberdaya (Usman, 2012). Standar pemberdayaan (Usman, 2012) mengenai *enabling* dan *empowering* saja yang akan menjadi alat menganalisis pemberdayaan yang ada di Desa Ketapang.

a) Menciptakan Iklim *(Enabling)*

Peneliti telah melakukan wawancara dengan berbagai pihak di Desa Ketapang, khususnya kelompok yang menjadi sasaran pembangunan. Hal yang dilakukan pertama kali di Desa Ketapang ialah menciptakan iklim *(enabling)* ekonomi dengan membenahi dan meningkatkan potensi mangrove menjadi destinasi wisata di Desa Ketapang.

Pemerintah juga melakukan pembentukan serta pelatihan UMKM dalam mengolah kuliner berbahan dasar ikan dan mangrove. Pada wawancara dengan salah satu pelaku UMKM, Ibu Rumsiah turut mengungkapkan bagaimana pemerintah menciptakan perubahan bagi kehidupan desa ketapang melalui program pembangunan dan pemberdayaan. Ibu Rumsiah selaku pelaku

UMKM sudah merasa terbantu dengan bantuan dinas perikanan.

> "*Yang ibu rasakan lebih bermanfaat, ada usaha. Setelah diajak sama dinas perikanan ibu jadi punya usaha kecil kecilan. Sebelumnya ga ada usaha. Awalnya ibu gatau dinas perikanan mau apa, tapi sekarang Alhamdulillah*." – Rumsiah (Ketua Kelompok UMKM).

b) Memperkuat Daya *(Empowering)*

Pemerintah melatih masyarakat untuk bisa menjalankan bisnis kuliner berbahan dasar dari kekayaan alam dan pesisir di Desa Ketapang. Berdasarkan informasi yang diperoleh saat wawancara bahwa masyarakat dilatih untuk bisa mengolah beberapa jenis makanan berbahan ikan dan mangrove.

Pemerintah menyalurkan peralatan pada setiap ketua kelompok untuk bisa digunakan bersama anggota kelompok agar bisa menjalankan bisnis. Dan hasilnya ternyata adanya peningkatan penghasilan dari bisnis makanan minuman yang bahan dasarnya dari kekayaan alam Desa Ketapang seperti ikan dan mangrove. Peningkatan ekonomi terjadi ketika wisata mangrove ramai pengunjung. Berikut ini dokumentasi sebagain kecil jenis peralatan yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM di Desa Ketapang.

Gambar 2. Hasil wawancara dengan pelaku UMKM dan Peralatan yang diberikan pemerintah untuk kegiatan UMKM.

Sumber: Peneliti, 2024

Kegiatan *empowering* memang diadakan oleh Dinas Perikanan melalui pelatihan kepada pelaku UMKM dan nelayan untuk meningkatkan keterampilan mereka, namun pada akhirnya tidak semua masyarakat dapat berdaya dan mandiri. Hal ini menurut Dinas Perikanan dan Aparatur Desa Ketapang bahwa tidak semua masyarakat aktif. Keduanya menyampaikan bahwa pembangunan manusia lebih sulit daripada pembangunan infrastruktur. Sementara mendengar pendapat dari masyarakat bahwa pelatihan hanya untuk kelompok tertentu. Begitupun dalam penyaluran bantuan.

c) Melindungi (*Protect*)

Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan pemberdayaan sekaligus perlindungan atas potensi yang dimiliki di Desa Ketapang. Pemberdayaan merupakan

bagian juga dalam melindungi sumberdaya dari kerusakan dan kesia-siaan. Menurut (Cholisin, 2011) melindungi dalam artian sebagai upaya mencegah dari kondisi yang semakin lemah. Akhirnya pemberdayaan sebagai upaya melindungi sumberdaya sekaligus memandirikan, membangun kemampuan masyarakat untuk kemajuan masyarakat ke kehidupan lebih baik (Andiany, 2015).

Pemerintah Kabupaten telah melakukan upaya perlindungan alam dengan melakukan rehabilitasi mangrove sekaligus menjadikannya objek wisata yang dapat mendorong ekonomi setempat. Pembangunan infrastruktur lainnya juga dilakukan seperti penataan rumah warga, jalan, dan sebagainya. Desa Ketapang yang dulunya kumuh kini sudah lebih baik. Selain perlindungan melalui pembangunan infrastruktur, pemerintah juga memberikan berbagai macam pelatihan untuk melindungi masyarakat dari ketidakberdayaan sekaligus upaya mengembangkan potensi mereka agar mampu berkarya.

Dilihat dari pengelolan sektor-sektor yang telah diciptakan pemerintah terlihat masih belum optimal dalam melindunginya. Pasalnya selain pengelolaan wisata yang tidak berkembang, juga penyaluran bantuan pada sebagaian masyaraka tidak sampai. Artinya perlu pengawasan dan perlindungan terhadap pembangunan dan pemberdayaan yang sudah berjalan di Desa Ketapang. Mengingat perlindungan ini penting agar menjaga dampak baik bagi peningkatan perekonomian masyarakat pesisir. *Protecting* di Desa Ketapang merupakan bagian proses pemberdayaan di mana masyarakat dan lingkungan yang perlu dilindungi dari keterbengkalaian dan tidak berkembangnya pembangunan yang sudah dilakukan

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Program Gerbang Mapan di Desa Ketapang sejauh ini memang telah membuat kondisi lingkungan dan masyarakatnya berubah dari kondisi awal lingkungan yang kumuh, tidak tertata, dan sering terkena bencana. Setelah hadirnya program pembangunan bernama Gerbang Mapan lingkungan Desa Ketapang disulap menjadi lebih rapih dan menarik dengan dibuatnya menjadi Desa Wisata melalui pemanfaatan potensi alam. Akan tetapi persoalan datang dari pengelolaan wisata yang dianggap kurang maksimal sehingga membuat wisata Mangrove menjadi sepi saat ini. Kemudian keberatan masyarakat setempat membayar tiket masuk serta tidak dilibatkannya masyarakat setempat dalam bisnis tersebut menjadi konflik yang terus diperbincangkan masyarakat. Hal lain dari pemberdayaan, yang dianggap masyarakat kurang maksimal ialah penyaluran bantuan kepada nelayan dan pedagang yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. Begitulah yang

terjadi dalam realisasi program Gerbang Mapan di Desa Ketapang.

Daftar Pustaka

Adibowo, Rino (2014). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi Di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat).

Afrizal, & Nazki. (2017). Studi Pelaksanaan Kewenangan Desa Malang Rapat Dalam Mengelola Potensi Wisata. Jurnal Selat, 5(1), 88–104.

Andiany. (2015). Pengembangan Model Pendekatan Partisipatif Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Medan Untuk Memperbaiki Taraf Hidup.

Cholisin. (2011). pemberdayaan masyarakat.

Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018). Kolaborasi Pemerintah dalam Pengembangan Terpadu Wilayah Pesisir di Kabupaten Tangerang melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan). *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, *1*, 517–529.

Firmansyah. (2022). *Masyarakat Pesisir Tangerang Apresiasi Program Gerbang Mapan, Gini Caranya*.

Gemiharto, I., & Rosfiantika, E. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Indonesia (Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, *7*.

Josiana, G. R., & Hizbaron, D. R. (2019). Kajian Kerentanan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Pesisir Terhadap Erosi Pantai di Pantai Trisik, Kulonprogo, DIY. Jurnal Bumi Indonesia, 8, 274–282.

Ketapang, P. (2024). *Website Resmi Desa Ketapang*.

Maezahroh. (2018). *Evaluasi Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan) Di Kabupaten Tangerang*.

Mulyadi. (2005). Ekonomi Kelautan. PT Raja Grafindo Persada.

Najiyati. (2005). Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. *Proyek Climate Change, Forest and Peatlands Indonesia*.

Perbub. (2022). *PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2022-2046 DENGAN*. *8.5.2017*, 2003–2005.

Safrina, S. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Di

Aceh. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2(1), 30–49. https://doi.org/10.38011/jhli.v2i1.19.

Saputra, B. Y. (2016). Strategi Pembangunan Wilayah Pesisir Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. *Studi, Program Administrasi, Ilmu Ilmu, Fakultas Dan, Sosial Politik, Ilmu Sultan, Universitas*.

Sartika, T. D. (2019). Pengembangan Desa Wisata Nelayan Dengan Pendekatan CBT dan Blue Economy di Desa Ketapang. 346(X), 1–9.

Shafira, M., & Anwar, M. (2021). Model Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Masyarakat. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 11(2), 103. https://doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.9233.

Slamet Mulyana & Meria Octavianti. (2018). Komunikasi Pembangunan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Purna Pekerja Migran.

Usman, S. (2012). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.

Wibowo, B. A., Bambang, A. N., Pribadi, R., Setiyanto, I., Prihantoko, K. E., & Sutanto, H. A. (2022). Strategi Pengelolaan Kawasan Pesisir di Pasar Banggi Kabupaten Rembang dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). *Jurnal Kelautan Tropis, 25*(2), 191–201. https://doi.org/10.14710/jkt.v25i2.12381

Yuliadi, L. P. S., Nurruhwati, I., & Astuty, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Sampah Pesisir Untuk Mendukung Kebersihan Lingkungan Dalam Upaya Mengurangi Sampah Plastik Dan Penyelamatan Pantai Pangandaran. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(1), 14–18.